

SEMINAR NASIONAL & PELATIHAN SIMULASI SIDANG
27-28 FEBRUARI 2019 KANTOR DPRD PROV. SULUT

Buletin

Parlementaria



Nomor 1044/II/III/2019 • Maret 2019



Mahasiswa Harus Terlibat Aktif Memajukan Bangsa



KTP-el untuk WNA Harus Ditinjau Ulang

Mahasiswa Harus Terlibat Aktif Memajukan Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Utut Adianto menegaskan, mahasiswa sebagai generasi penerus intelektual, harus terlibat aktif dalam memajukan bangsa.

Karena merekalah yang nantinya akan menggantikan generasi yang memimpin saat ini, untuk maju menjadi pemimpin bangsa ke depannya.

Hal itu dikatakan Utut di hadapan 500 peserta Parlemen Kampus dari Universitas Negeri Manado, Universitas Samratulangi, Institut Agama Islam Negeri Manado, Universitas Kristen Tomohon, Universitas

Katolik De la Sale, Politeknik Negeri Manado dan Sekolah Tinggi Manajemen Basis Bitung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara, Manado, Sulut, Rabu (27/2).

“Kegiatan Parlemen Kampus ini sangat penting sebagai pendidikan politik berkelanjutan bagi mahasiswa yang mampu memperbarui *mindset* nilai-nilai terkini yang berkarakter dan beradab, sesuai

kebhinekaan bangsa,” kata politisi PDI-Perjuangan daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VII itu.

Parlemen Kampus 2019 yang mengambil tema “Pemilu Serentak 2019: Dinamika, Tantangan dan Harapan” ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, Anggota Komisi IV DPR RI Djenri Alting Keintjem (F-PDI Perjuangan/dapil Sulut), Ketua DPRD Manado Andrei Angouw, Rektor Universitas Negeri Manado (Unima) Julyeta Runtuwene, dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengapresiasi Parlemen Kampus yang dapat memberi pencerahan kepada mahasiswa



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto bertukar cinderamata dengan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, disaksikan Sekjen DPR RI dan Rektor Unima



tentang mekanisme kerja DPR dan sistem politik ketatanegaraan, sehingga mempertebal rasa kebangsaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia mengingatkan pentingnya generasi muda mempelajari ilmu politik, karena di zaman yang semakin berkembang ini ilmu yang dimiliki harus diperbarui.

“Politik memiliki manfaat sebagai ilmu, politik sebagai substansial dan politik sebagai alat. Dan saya berterimakasih kepada DPR RI sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa di Sulut untuk mendapatkan ilmu legislatif melalui Parlemen Kampus,” apresiasi Wagub Steven.

Sementara itu, Rektor Unima Julyeta Runtuwene mengatakan, dengan Parlemen Kampus ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi dapat berkomunikasi dengan Pimpinan dan Anggota DPR RI dan mempraktekkan simulai persidangan.



Foto: Ryan Ibr

Sehingga meningkatkan wawasan obyektif, cara berpikir serta memahami tugas dan fungsi DPR RI. Ia berharap mahasiswa siap dan mampu duduk di parlemen dan berkarya membangun Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengaku sangat bangga dengan antusiasme mahasiswa Sulawesi Utara yang mengikuti rangkaian kegiatan Parlemen Kampus 2019 dengan memberikan pertanyaan dan saran-saran yang konstruktif terhadap DPR RI. “Ini membuktikan mahasiswa sangat peduli terhadap politik negara. Teman-teman mahasiswa telah mengetahui produk legislasi dari tahun ke tahun periode DPR 2014-2019,” puji Indra.

Indra menambahkan, mahasiswa sebagai generasi bangsa diharapkan tetap mempunyai semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik, apapun golongan dan pilihan politik dan partainya. Ia berharap Parlemen Kampus 2019 di Manado ini dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi para mahasiswa, guna mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan.

Parlemen Kampus diselenggarakan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulut, DPRD Provinsi Sulut, dan Universitas Negeri Manado. Acara yang berlangsung pada Rabu-Kamis, 27-28 Februari 2019 ini dimulai dengan pengenalan mekanisme kerja DPR RI, tata cara persidangan dan pengambilan keputusan di DPR RI, sedangkan hari ke dua digelar simulasi persidangan DPR RI.

Materi mekanisme persidangan yang disampaikan Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti meliputi teknis penyelenggaraan, tata cara sidang dan pengambilan keputusan termasuk cara-cara memimpin sidang. Anggota dan Pimpinan sidang harus tahu tata cara dan substansi sidang, misalkan tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Mahasiswa dituntut berpikir dan bertindak adil, berpikir logis, rasional dan intelek dalam menyikapi berita dan informasi, sehingga dapat mengambil keputusan. Mahasiswa akan simulasi bertugas sebagai Anggota DPR RI, mulai dari agenda persidangan, pembahasan daftar inventarisasi masalah suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) dari pemerintah maupun DPR RI dan melakukan lobi-lobi politik di DPR RI. Sehingga tidak men-judge ujungnya saja, tetapi mengetahui *framework* dan memahami proses dari hulu sampai ujungnya. ■ dz/sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Sofyan Efendi
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra
SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari
ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H., Erman Suhendri, S.Sos.I,
Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Natasya Armanda Prihandini,
S.Kom. Rahayu Setyowati, Muhammad Husen Virgianne Meiske
Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,
Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli
Singgih Rimbani Kinanti, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Arimbi
Puspa Ratri, Nafisa Hanum Alaydrus,
Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha,
Puntho Pranowo.
FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiaty, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldio Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari,
Sunarya, Fahmi Harfa, Nathan Dimas Saminto,
Safitri Restu Widaywati, SIP.

INFOGRAFI
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.
ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)
PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito
STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman
PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)
KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna
ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV di hadapan Rapat Paripurna DPR RI

Pemilu 2019 untuk Kejayaan Bangsa

Pemilu serentak yang digelar pada tahun 2019 ini merupakan ekspresi kejayaan Bangsa Indonesia. Pemilu merupakan gerbang kemajuan bagi Indonesia.

Dari Pemilulah pemimpin bangsa ini dilahirkan untuk lima tahun ke depan. Sebagai negara demokratis terbesar di dunia, Indonesia akan kian disegani bangsa-bangsa lain bila berhasil melaksanakan Pemilu.

“Saya kembali mengajak semua elemen bangsa, mari kita jadikan Pemilu 2019 sebagai pintu gerbang menuju kemajuan dan kejayaan bangsa,” ucap Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/3).

Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI ini menekankan, Pemilu harus dijadikan ajang adu ide dan gagasan, bukan permusuhan dan kebencian. Politik di Tanah Air harus menjauhkan diri dari anasir permusuhan dan kebencian itu yang merusak pondasi bangunan berbangsa. Pemilu sekali lagi jadi kebijakan hulu suatu bangsa untuk memulai pembangunan.

“Kalau kita sukses untuk kesekian kalinya melaksanakan Pemilu secara damai, maka Indonesia akan menjadi pendatang baru sebagai kampiun demokrasi baru di dunia. Karena itu, Pemilu harus dijadikan harus dijadikan

persaingan ide dan gagasan, adu visi dan program, serta lomba kecerdasan strategi untuk meraih simpati dan dukungan rakyat,” papar politisi Partai Golkar ini.

Kodrat bangsa Indonesia yang sangat beragam merupakan aset berharga yang tak boleh dirusak oleh permusuhan dalam Pemilu. Perbedaan pilihan politik tak boleh mengorbankan kebhinekaan Indonesia. Bamsoet bahkan mengingatkan, membenci dan memusuhi lawan politik sebaiknya sederhana saja, karena bisa jadi lawan politik itu kelak akan menjadi kawan politik yang dipuja-puja.

“Mengutip kalimat bijak seorang tokoh Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin yang mengutip pula dari Ali Bin Abi Thalib RA, yakni, cintailah kekasihmu sedang-sedang saja karena boleh jadi suatu saat, engkau akan membencinya. Kalau kita kaitkan dengan kondisi kekinian, cintailah paslon presiden-wakil presiden pilihanmu sedang-sedang saja, karena boleh jadi suatu waktu, engkau akan membencinya. Begitu juga sebaliknya,” jelas Bamsoet.

■ mh/sf

Ketua DPR Pandu Pelantikan Anggota PAW

Pelantikan politisi Fraksi Partai Hanura, Tari Siwi Utami, menjadi salah satu agenda dalam Rapat Paripurna DPR RI pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Pimpinan DPR RI lainnya memandu proses pelantikan Anggota PAW yang menggantikan Anggota Komisi IV DPR RI Fauzi Amro itu. Tari terpilih menjadi Anggota DPR RI PAW melalui keputusan Presiden RI No. 21/P tahun 2019, tertanggal 20 Februari 2019.

“Sebelum memangku jabatan Anggota DPR RI, saudara wajib disumpah menurut agama Islam. Sumpah yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab

terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab menjaga dan memelihara Pancasila dan UUD 1945. Sumpah ini adalah janji kepada Tuhan YME dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Apakah saudara bersedia,” tanya Ketua DPR RI yang disusul jawaban “iya” oleh Tari Siwi Utami di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (04/3).

“Di sisa masa jabatan peraiode ini, saya akan mengusung atau memperjuangkan bidang infrastruktur untuk masyarakat di dapil saya, Sumatera Selatan I...”

Ditemui usai pelantikan, politisi yang pernah menjadi Anggota DPR RI periode tahun 1999-2004 silam ini mengaku, meski saat ini ia masuk dalam sisa masa jabatan alias sebagai Anggota PAW, namun ia merasa punya tanggung jawab terhadap konstituen yang diwakilinya. Dengan kata lain, ia bertekad untuk tetap bekerja demi kepentingan bangsa dan negara.

“Di sisa masa jabatan periode ini, saya akan mengusung atau memperjuangkan bidang infrastruktur untuk masyarakat di dapil saya, Sumatera Selatan I yang meliputi Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, dan Kota Lubuklinggau. Karena saya menilai di daerah ini perlu mendapat perbaikan infrastruktur dan berbagai fasilitas di dalamnya,” ujar Tari, begitu ia biasa disapa.

■ ayu/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Pimpinan DPR RI lainnya memandu proses pelantikan Anggota PAW politisi Fraksi Partai Hanura, Tari Siwi Utami

Foto: Azka | rni

KTP-el untuk WNA Harus Ditinjau Ulang

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menilai pemberian KTP-Elektronik (KTP-el) bagi Warga Negara Asing (WNA) perlu ditinjau ulang, terlebih lagi jika itu dikatakan sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.



Foto: Kresno Irti

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Menurutnya, KTP-el filosofinya merupakan identitas untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk Indonesia yang permanen.

“Kita juga tidak mengenal *double* kewarganegaraan. Oleh karena itu, jika dikatakan hal itu sudah sesuai dengan undang-undang, maka akan kita kaji apa memang dalam undang-undangnya seperti itu. Kalau undang-undangnya disalah interpretasikan, kalau perlu undang-undangnya direvisi. KTP-el ya harus untuk Warga Negara Indonesia,” ujar Fadli saat ditemui usai Rapat

Pariwisata, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/3).

Dilanjutkan politisi Partai Gerindra itu, hal ini akan sangat membahayakan jika KTP-el tersebut diberikan kepada WNA, karena bisa disalahgunakan oleh orang tersebut. Misalnya untuk membeli lahan, membuka rekening bank dan lain sebagainya. Terlebih lagi jika jumlahnya berjuta-juta. Bagi seorang WNA untuk menjadi WNI prosesnya sangat panjang.

“Jika pun mau dengan jalan cepat, ya harus memiliki sebuah prestasi tertentu, seperti menjadi juara dunia olahraga tertentu. Itupun harus mendapat persetujuan DPR RI, serta melalui sejumlah test kewarganegaraan. Misalnya harus hafal Pancasila dan lain sebagainya,” ungkap Fadli.

Terkait dengan Pemilu dan lainnya, lanjut legislator dapil Jawa Barat V itu, harus dibereskan dulu hal-hal seperti data ganda, dan data invalid dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal itu agar data-data bermasalah ini tidak ikut Pemilu. Supaya Pemilu nanti benar-benar bersih. ■ ayu/sf

“Jika pun mau dengan jalan cepat, ya harus memiliki sebuah prestasi tertentu, seperti menjadi juara dunia olahraga tertentu. Itupun harus mendapat persetujuan DPR RI, serta melalui sejumlah test kewarganegaraan. Misalnya harus hafal Pancasila dan lain sebagainya,”



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah didampingi Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno, Anggota Komisi X DPR RI Putu Supadma Rudana, dan Anggota Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono menerima kunjungan kehormatan Parlemen Norwegia yang dipimpin oleh H.E. MS. Elin Rodum Agdestien ke Gedung DPR RI.

Fahri mengatakan, kedatangan Parlemen Norwegia ke DPR RI tersebut adalah untuk lebih meningkatkan komitmen hubungan antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Norwegia yang selama ini telah berjalan, baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Beberapa isu hangat yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya implementasi demokrasi di Indonesia, kelestarian

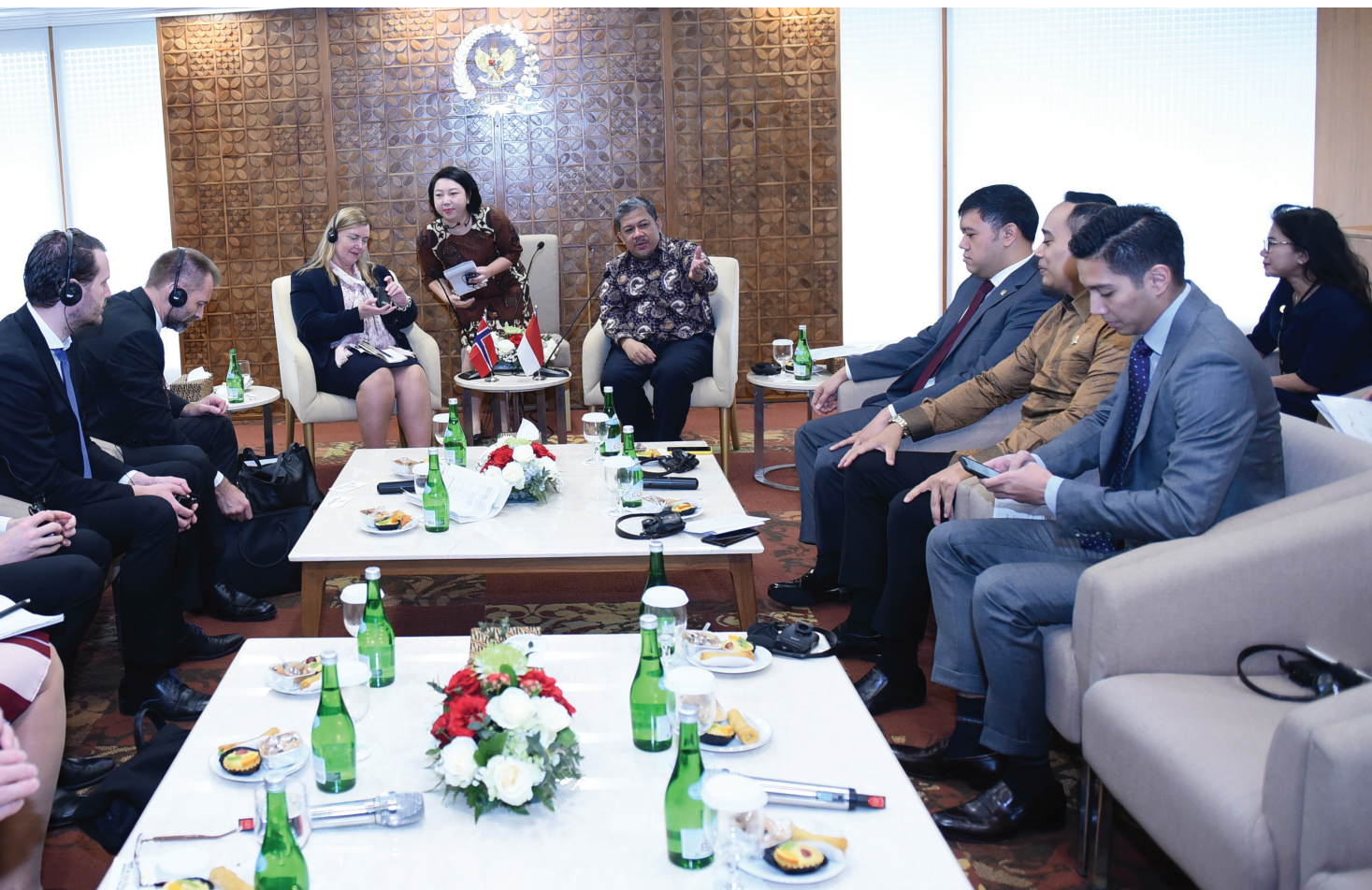


Foto: Jaka Iri

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di dampingi Anggota DPR RI menerima kunjungan kehormatan Parlemen Norwegia yang dipimpin oleh H.E. MS. Elin Rodum Agdestien

Fahri Hamzah Bahas Implementasi Demokrasi Indonesia dengan Parlemen Norwegia

lingkungan, dan bidang pariwisata.

“Seperti diketahui, saat ini kita sedang menghadapi (pelaksanaan) Pemilu yang pertama kali dalam sejarah Indonesia, dimana Pemilu tersebut dilakukan secara serentak. Oleh karenanya, semua anggota Parlemen secara nasional, masing-masing tengah mempunyai kesibukan,” ucap Fahri dalam sambutannya kepada delegasi Parlemen Norwegia, di gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (05/3).

Legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menyatakan, DPR RI menyambut gembira atas kehadiran (delegasi) Anggota Parlemen dari Norwegia. Ia berharap, sebelum berakhir masa jabatan dalam periode ini, dirinya bisa melakukan

kunjungan ke Norwegia guna meresmikan eratnya hubungan antara kedua belah negara. Menurutnya, Indonesia dan Norwegia mempunyai rute demokrasi yang sama.

“Demokrasi Norwegia tentu lebih tua, dan kami perlu belajar banyak. Meskipun kami mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak, yakni sekitar 270 juta orang penduduk yang menghuni ribuan pulau yang terbagi dalam 34 provinsi, 514 kota dan kabupaten, 8 ribu kecamatan, dan 83 ribu desa diseluruh Indonesia. Semoga kita bisa melanjutkan kerja sama yang sudah terbangun dan mendiskusikan hal-hal yang bersifat produktif bagi kedua negara,” harap Fahri.

Pada pertemuan itu, Dave Akbarshah Fikarno dan Budisatrio Djiwandono sempat menyampaikan mengenai beberapa persoalan yang sedang dihadapi oleh Indonesia, diantaranya tentang masalah sampah plastik dan *illegal fishing*. Sedangkan Putu Supadma Rudana menyampaikan mengenai sektor pariwisata Indonesia, khususnya tentang adat dan budaya masyarakat Bali. Putu berharap agar Delegasi Parlemen Norwegia bisa berkunjung menikmati keindahan Pulau Bali. Sebelumnya, Elin Rodum Agdestien beserta rombongan Anggota Parlemen Norwegia lainnya juga berkesempatan *tour building* di Kompleks Parlemen, Senayan. ■ **dep/sf**



Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi

Asistensi Wujud Optimalisasi Pembelian Alutsista Rusia

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, permasalahan perjanjian asistensi setelah masa kontrak untuk pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) harus jadi perhatian serius bagi Indonesia dan Rusia.

kesiapan alutsista yang dibeli Indonesia dari Rusia menjadi tidak optimal penggunaannya.

Hal ini ia sampaikan sesuai mengikuti pertemuan Komisi I DPR RI dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmina Vorobieva di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/3). Bobby berharap Dubes Rusia untuk Indonesia dapat segera menyampaikan persoalan ini kepada Pemerintah Negara Federasi Rusia untuk ditindaklanjuti, agar tidak menimbulkan stigma buruk terhadap alutsista Rusia ke depannya.

“Maksudnya keadaan siaganya itu, siap operasinya tidak optimal, sehingga kami ingin mendapatkan masukan dari pihak Kedutaan Besar bahwa ke depannya, dan juga kondisi saat ini

Ia meminta perjanjian setelah masa kontrak segera diwujudkan. Sebab apabila kondisi ini dipertahankan, maka

Foto: Anief/m

Legislator Imbau Pemerintah Cegah Arus Impor Pertanian

Anggota Komisi IV DPR RI Agung Widyantoro mengapresiasi hasil produksi pertanian yang relatif lebih meningkat. Namun demikian Agung menyampaikan, kenaikan dari sisi hasil produksi tersebut harus diimbangi oleh jaminan dari pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga dan mencegah derasny arus impor.

“Pemerintah melalui kebijakan mekanisasi alat pertanian dan kartu pupuk bersubsidi memudahkan petani untuk meningkatkan satuan tambah luas. Adapun sumber alat mesin pertanian ini berasal dari berbagai pemangku kebijakan seperti Menteri, Bupati,

Walikota, Kepala Daerah Tingkat I, dan juga aspirasi dari DPR RI.” ujar Agung usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/3).

Legislator Fraksi Partai Golkar ini pada kesempatan yang sama menyatakan, hal yang masih memprihatinkan adalah pemerintah belum bisa maksimal untuk mencegah derasny arus impor bawang merah. Agung menjelaskan, di daerah pemilihannya seperti wilayah Brebes, Jawa Tengah, sebetulnya mempunyai hasil produksi melimpah dan merupakan penyanga 30 persen kebutuhan nasional.

“Masyarakat petani di daerah pemilihan (dapil) saya, kehidupannya sangat bergantung pada hasil panen bawang merah. Namun, ketika hasil panen bagus dan produksi melimpah, justru harganya jatuh dan kemudian datanglah bawang impor. Sehingga, petani yang sudah berkorban uang dan tenaga tidak bisa terpenuhi harapannya untuk



Anggota Komisi IV DPR RI Agung Widyantoro

Foto: Jk/hr

hal tersebut harus diperhatikan. Jangan sampai ada anggapan bahwa jika membeli alutsista dari Rusia itu pemeliharaannya tidak bagus, sehingga kesiapsiagaannya jadi berkurang,” analisa Bobby.

Politisi Partai Golkar ini mengaku bahwa Komisi I DPR RI tidak dapat melakukan intervensi terhadap masalah tersebut. Hal ini bukan merupakan domain dari DPR RI, karena merupakan permasalahan teknis yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, ia berharap kepada Dubes Rusia untuk menindaklanjuti permasalahan *after sales service* ini.

“Mereka menyampaikan akan ada lanjutan pembicaraan masalah ini. Tapi kami nyatakan, kalau pembahasan teknis kami tidak ikut membahas, itu ranah eksekutif. Jadi kami ingin mereka mengadakan pertemuan rutin dengan Kementerian Pertahanan atau TNI untuk memastikan hal-hal tersebut dapat diminimalisir,” tukas politisi dapil Sumatera Selatan II ini.

■ eps/sf

“Indonesia merupakan negara kepulauan, tentunya negara kita sebagai penghasil bahan-bahan pertanian seperti padi, palawija dan juga khususnya wilayah dapil kami yang daerah pantai merupakan daerah penghasil produksi garam yang melimpah.

menyejahterakan keluarganya,” tutur Agung.

Agung mengimbau, pemerintah melalui Menteri Pertanian harus bisa membatasi derasnya arus impor, baik untuk komoditas bawang merah maupun hasil pertanian lainnya, khususnya komoditi yang sensitif di dapil Jawa Tengah IX yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal, seperti beras maupun garam.

“Indonesia merupakan negara kepulauan, tentunya negara kita sebagai penghasil bahan-bahan pertanian seperti padi, palawija dan juga khususnya wilayah dapil kami yang daerah pantai merupakan daerah penghasil produksi garam yang melimpah. Jadi saya rasa tidak perlu ada impor,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah IX tersebut. ■ pun/sf

Komisi II Apresiasi Capaian PTSL BPN Sidoarjo

Kinerja Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo dalam menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI.



Foto: Erman Ibr

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali

Diketahui pada awal tahun 2018, PTSL di Sidoarjo ditargetkan sebanyak 60.000 bidang, seiring berjalannya waktu dapat dioptimalisasi menjadi 70.640 bidang dengan realisasi fisik sejumlah 62.381 bidang.

“Dari tahun ke tahun sejak program PTSL ini diluncurkan, itu targetnya selalu terpenuhi bahkan melampaui. Pada kunspek kali ini kami pilih tempat-tempat tertentu yang memang skala target PTSL-nya besar, salah satunya seperti di Sidoarjo,” terang Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Kepala Kanwil BPN Jatim, Kepala Kantor BPN Sidoarjo, di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (05/3).

Di beberapa daerah, persoalan PTSL terbilang rumit. Bahkan Zainudin mengungkapkan bahwa ia pernah menerima keluhan dari beberapa kepala desa yang enggan melaksanakan program PTSL karena

takut terjerat kasus hukum. Untuk itu, ia juga mengapresiasi BPN Sidoarjo yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta penegak hukum dalam menyosialisasikan program PTSL secara masif kepada masyarakat.

“Kendala-kendala yang dihadapi kami sudah bisa kami tangkap, dan saya kira dari waktu ke waktu kita tentu ingin meningkatkan lebih dari apa yang ada sekarang. Sekuat apapun program ini, kalau tidak di-support oleh masyarakat serta instansi lain, juga tidak akan ada gunanya,” tambah politisi Partai Golkar ini.

Kekurangan sumber daya manusia selalu menjadi kendala di seluruh Kantor BPN, selain itu juga dibutuhkan bangunan fisik guna menyimpan pengarsipan. Untuk itu, legislator dapil Jawa Timur XI ini berpesan agar pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh berhenti hanya karena beberapa kendala tersebut. Harus terus berupaya dan berikhtiar dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Sementara itu Kepala Kanwil BPN Jatim Herry Santoso tetap optimis target PTSL tahun 2019 tetap tercapai. Ia mengatakan di beberapa Kantor BPN yang sudah mencanangkan bahwasanya pada bulan April pengukuran sudah selesai. Sehingga apabila ada optimalisasi akan segera dapat ditindaklanjuti, jadi kemungkinan tambahan melampaui target itu tetap ada.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan komitmen bersama yang kami terapkan, Alhamdulillah kami selalu melampaui target. Kualitas sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat pendaftaran PTSL ini sangat kami jaga, sehingga di kemudian hari tidak ada yang bermasalah,” terang Herry.

Kunspek Komisi II DPR RI ke Sidoarjo juga diikuti Anggota Komisi II DPR RI Agus Susanto (F-PDI Perjuangan), Rambe Kamaruzzaman dan Melda Addriani dari Fraksi Partai Golkar, Azikin Solthan (F-Gerindra), Libert Kristo Ibo (F-Demokrat), Abdul Hakam Naja (F-PAN), Aus Hidayat Nur (F-PKS), Achmad Baidowi (F-PPP) serta Kreshna Dewanata Phrosakh (F-NasDem). ■ es/sf

BPN Jangan Tebang Pilih Selesaikan Sertifikasi Tanah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengimbau kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor untuk tidak tebang pilih dalam menyelesaikan sertifikasi tanah di wilayah kerjanya, khususnya pelayanan mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hal tersebut diungkapkan Herman saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI dengan Wakil Bupati Bogor beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat serta Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (05/3).

“BPN jangan sampai mencederai program yang sudah bagus ini dan malah menimbulkan *image* yang kurang baik. Misalnya, ada pungutan liar dan sertifikat yang tidak selesai, kemudian yang skala besar dapat dengan mudah mengurus tanah. Sehingga target masyarakat kecil tidak selesai,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Diakui Herman, target PTSL untuk di



Foto: Eka Himbara | Iir

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron memberikan keterangan

DPR-Pemerintah Setujui Egwatu Jadi WNI

DPR RI dan pemerintah akhirnya menyetujui permohonan pesepak bola asal Nigeria Egwatu Godstime Ouseloka menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah berkirim surat kepada Ketua DPR RI untuk meminta pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Egwatu Godstime Ouseloka menjadi WNI.

Demikian terungkap dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (06/3). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedia Panjaitan secara khusus memang untuk mendengarkan penjelasan Menkum HAM soal permohonan Egwatu jadi WNI.



Foto: Andri | Iri

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedia Panjaitan bersama Ketua Komisi III Kahar Muzakir berbincang dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

Dalam rapat itu, Trimedia menyampaikan, “Surat dari Komisi X kepada Pimpinan DPR RI tanggal 23 Januari 2019 perihal pertimbangan kewarganegaraan atas nama Egwatu Godstime Ouseloka disampaikan bahwa Komisi X

merekomendasikan untuk menjadi WNI.”

Sementara Menkum HAM dalam penjelasannya menyatakan, permohonan Egwatu sudah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (3) PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan

Kabupaten Bogor termasuk yang paling besar di Indonesia, sehingga diperlukan berbagai inovasi dalam mencapainya. Diketahui, pada tahun 2017 PTSL di Kabupaten Bogor ditargetkan sebanyak 97 ribu bidang tanah, tahun 2018 sejumlah 80 ribu bidang, dan di tahun 2019 sejumlah 75 ribu bidang.

“Capaian BPN Bogor ini sudah sangat maksimal, kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan juga sudah sangat luar biasa. Kita wajib memberikan suatu apresiasi kepada jajaran BPN dalam melaksanakan program PTSL, yang merupakan program pemerintah karena sudah berjalan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.

Herman menambahkan, pihaknya akan mendukung agar program ini dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Komisi II DPR RI juga akan membuat aturan pengesahan, pengakuan dan legitimasi kepemilikan sertifikat tanah untuk menghindari konflik sengketa pertanahan yang berujung gugatan.

“Komisi II DPR akan mencari mekanisme yang lebih baik. Dan ke depannya kita akan merancang agar sertifikat setelah lima tahun tidak dapat digugat hukum alias menggunakan sistem positif,” pungkas politisi dapil Jawa Barat ini. ■ **hr/es/sf**

RI. Kronologis permohonan kewarganegaraan ini bermula saat Dirjen Administrasi Umum Kemenkum HAM menerima surat dari Sekjen Kemenpora 18 Juni 2018 lalu prihal naturalisasi pesepakbola Nigeria tersebut.

Karena Egwuatu dinilai berjasa ikut memajukan sepakbola nasional, Kemenpora lalu membicarakannya dengan Komisi X DPR RI. Dan hasil rapat Pimpinan DPR RI dengan pimpinan komisi dan fraksi memutuskan agar permohonan ini diserahkan kepada Komisi III DPR RI untuk membahasnya.

“Setelah dilakukan pemeriksaan permohonan kewarganegaraan RI dari Sekjen Kemenpora tersebut, dokumen yang dilampirkan telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) PP Nomor 2 Tahun 2007,” urai Menkum HAM di hadapan Komisi III DPR RI. Selain persyaratan administrasi, untuk menjadi WNI disyaratkan setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan berjasa kepada NKRI. Egwuatu pun dinilai telah memenuhi semua kriteria tersebut.

■ **hr/mh/sf**

Pemkab Bekasi Diberi Rapor Merah oleh Ombudsman

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendapat rapor merah oleh Ombudsman dalam pengurusan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang.



Foto: Erlangga | Imi

Anggota Komisi II DPR RI Tamanuri (kanan)

Anggota Komisi II DPR RI Tamanuri menyampaikan rasa kecewanya kepada Pemkab Bekasi perihal masalah tersebut.

Saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Pemkab Bekasi yang fokus membahas segala kebutuhan menyambut Pemilu, Tamanuri menjelaskan, masih ada sekitar ratusan ribu daftar pemilih yang belum terselesaikan, dikarenakan fasilitas yang sangat terbatas, serta Pemkab Bekasi yang sedang dihadapkan banyak masalah.

“Banyak masalah-masalah yang belum bisa teratasi di Bekasi. Terutama yang ada di pelupuk mata, yaitu masalah untuk mereka terdaftar sebagai DPT dalam Pemilu besok. Ini bagaimana, kita sudah menghitung hari untuk Pemilu. Masih ada ratusan ribu lagi yang harus diselesaikan. Dan kemampuan di sini sepertinya sangat terbatas, karena fasilitas juga tidak cukup memadai,” tutur Tamanuri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (06/3).

Untuk itu Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDEM) ini mengimbau Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)

Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan perhatian lebih pada belum selesainya DPT di Kabupaten Bekasi ini. Menurutnya, apabila sarana cukup memadai dan sumber daya manusia ditambah, maka persoalan ini dapat terselesaikan sesaat sebelum Pemilu nanti.

“Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu problem yang harus ditindaklanjuti oleh Kemendagri, di mana fokusnya oleh Ditjen Dukcapil. Bila tidak jadi pantauan ketat, kami menjadi sangat yakin kabupaten ini berpotensi menimbulkan masalah di saat Pemilu nanti. Ini hanya masalah pendataan saja, apabila ditambahkan sarana yang memadai sesegera mungkin, pasti akan selesai,” tukas politisi dapil Lampung II ini.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Tamanuri sebagai Ketua Tim dan didampingi sembilan Anggota Komisi II DPR RI lainnya serta perwakilan dari Ombudsman dan Dinas Dukcapil setempat, mengunjungi Kantor Pemkab Bekasi. Tim Kunspek Komisi II DPR RI diterima Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

■ **er/sf**

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas berharap pemerintah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU). Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang kewenangan membentuk Undang-Undang (UU) ada pada DPR RI, tapi pembahasannya bersama pemerintah.

Berdasarkan data di Baleg, seluruh RUU yang ada di DPR RI baik dibahas di Komisi, Pansus dan Baleg hanya sedikit poin krusial. “Saya yakin dan percaya kalau pemerintah mau bersungguh-sungguh, seperti umpamanya Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli itu hanya soal-soal teknis, soal bahasa, dan soal penyempurnaan,” papar Supratman dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan

Baleg Harapkan Kesungguhan Pemerintah Bahas RUU

tajuk ‘4 RUU Rampung Sesuai Target?’ di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (05/3). Turut hadir sebagai pembicara, Anggota Baleg DPR RI Hendrawan Supratikno.

Diskusi ini sekaligus menanggapi pidato Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

“Jadi hanya tinggal penyempurnaan-penyempurnaan, redaksional dan lain sebagainya, secara substansial sudah tidak ada masalah. Nah kalau ini bisa dipercepat, terutama dari sisi kehadiran pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, maka seharusnya bisa disahkan,”



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas

Komisi I Dorong Parlemen Jerman Jajaki Kerja Sama dengan ASEAN

Komisi I DPR RI menerima kunjungan Parlemen Republik Federal Jerman dalam rangka membahas kemungkinan penajakan kerja sama multilateral dengan negara-negara di ASEAN.

Komisi I DPR RI kemudian mendorong Jerman untuk memperkuat kerja sama antara Jerman dengan ASEAN, karena banyak keuntungan yang dapat diraih dari berbagai sektor.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almayshari mengungkapkan pentingnya hubungan antar negara di tengah kerumitan dunia Internasional, dengan bergulirnya perang berbagai sektor yang didominasi China dan Amerika, bahkan termasuk adanya sisi Rusia.

“Semestinya tidak boleh ada kekuatan seperti ini. Melainkan harus dibangun secara multilateral diantara berbagai negara,” ujar Kharis usai pertemuan dengan Pimpinan dan Anggota Parlemen Republik Federal Jerman di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2). Turut hadir sejumlah



Komisi I DPR RI berfoto bersama Parlemen Republik Federal Jerman

yang menargetkan minimal dalam masa persidangan ini ada 4 RUU yang bisa disahkan. Supratman mengatakan, ada dua RUU yang dibahas di Komisi VI DPR RI, yakni RUU Tentang Perkoperasian, dan RUU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Dua RUU ini dalam tahap finalisasi, sekarang sudah masuk dalam tim perumus.

“Jadi hanya tinggal penyempurnaan-penyempurnaan, redaksional dan lain sebagainya, secara substansial sudah tidak ada masalah. Nah kalau ini bisa dipercepat, terutama dari sisi kehadiran pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, maka seharusnya bisa disahkan,” ungkap politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Supratman menyampaikan, RUU tentang Ibadah Haji dan Umrah yang dibahas di Komisi VIII DPR RI juga seharusnya bisa diselesaikan. Tinggal bagaimana kesungguhan DPR RI bersama pemerintah menyelesaikannya. “Justru mandeknya pembahasan undang-undang yang sekarang ada di parlemen karena ketidakhadiran pemerintah. Jadi pemerintahlah yang malas hadir dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang,” ungkap Supratman. ■ **eko/sf**

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, Komisi I DPR RI juga meyakinkan Jerman agar melakukan investasi di Indonesia. Menurutnya saat ini Indonesia dalam keadaan stabil. Selain itu, masih kata Kharis, Indonesia juga pasar yang sangat potensial bagi para pengusaha dalam negeri Jerman untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

“Kami menginginkan Parlemen Jerman dapat meyakinkan investor dalam negeri Jerman, bahwa Indonesia stabil. Indonesia adalah tempat yang sangat potensial untuk Jerman melakukan investasi. Hal ini disambut juga dengan baik dan kemungkinan untuk dibangunnya kerja sama antara *chamber of commerce* atau KADIN kedua negara,” imbuh Kharis.

Kunjungan Parlemen Republik Federal Jerman dalam rangka kunjungan balasan dari Parlemen Indonesia sebelumnya ke negara mereka. Dihadiri oleh enam Anggota Parlemen, Parlemen Jerman juga didampingi oleh Duta Besar Jerman untuk Indonesia. Selain melaksanakan pertemuan di ruang rapat, mereka juga menyempatkan berkeliling Gedung DPR RI. ■ **eps/sf**

Revitalisasi PG Diharapkan Kurangi Impor

Program revitalisasi pabrik gula (PG) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sesuatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Revitalisasi tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas gula nasional yang terus menurun. Program revitalisasi PG juga bertujuan untuk memastikan produksi gula dalam negeri menjadi lebih stabil dan diharapkan dapat mengurangi impor.

“Revitalisasi pabrik gula BUMN memang harus dilakukan. Sebab kalau tidak, maka hasil produksi gula nasional akan selalu tertinggal, efisiensinya rendah, dan pada akhirnya tidak akan memberikan manfaat yang baik bagi korporasi maupun masyarakat,” tandas Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno sesaat sebelum Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/3).

Dikatakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, revitalisasi industri gula nasional sudah sangat urgen untuk dilakukan. Tidak bisa pungkiri bahwa untuk memiliki kedaulatan dan tidak selalu didikte oleh impor, maka salah satu peran penting yang harus dilakukan adalah revitalisasi PG tersebut.

“Namun revitalisasi jangan sampai mengabaikan kepentingan petani tebu. Revitalisasi pabrik gula harus

Kementerian Pertanian harus berani membuka lahan di luar Pulau Jawa, seperti di Papua, Sulawesi atau Kalimantan. “Selain itu, ada satu hal yang juga menjadi kekhawatiran kita, yakni kurangnya bibit-bibit tebu yang berkualitas yang kita miliki,”



Foto: Kresno | hr

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno

menciptakan *multiplier effect* bagi petani tebu. Petani akan malas menanam tebu jika harga jualnya murah. Untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat petani kepada pabrik gula, kuncinya adalah keadilan,” ujarnya.

Teguh menyatakan, salah satu tantangan lain dari PG adalah masalah ketersediaan lahan untuk pertanian tebu. “Andalan kita selama ini adalah Pulau Jawa. Sementara di Jawa sudah terjadi konversi atau alih fungsi lahan. Di sisi lain ada kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan terhadap kebutuhan pokok seperti padi,” imbuh Teguh.

Legislator dapil Jawa Tengah IX itu menekankan, Kementerian Pertanian harus berani membuka lahan di luar Pulau Jawa, seperti di Papua, Sulawesi atau Kalimantan. “Selain itu, ada satu hal yang juga menjadi kekhawatiran kita, yakni kurangnya bibit-bibit tebu yang berkualitas yang kita miliki,” pungkasnya. ■ **dep/sf**

PKAKN DPR Serap Informasi Penyaluran Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat bagi desa untuk dapat mengatur pemerintahan desa dalam rangka membangun pembangunan nasional.

U ini juga mengamankan penyaluran Dana Desa ke seluruh desa di Indonesia. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2018 pemerintah menggelontorkan anggaran Dana Desa sebesar Rp 60 triliun, dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp 70 triliun.

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Helmizar memimpin PKAKN Badan Keahlian DPR RI mengumpulkan data dan informasi mengenai penyaluran dan realisasi penerimaan Dana Desa dan permasalahannya ke Kabupaten Brebes

dan Kabupaten Tegal, serta menggali informasi mengenai koordinasi inspektorat daerah.

“Kami ingin menggali informasi mengenai koordinasi inspektorat daerah seperti BPK, BPKP, dan KPK dalam pengawasan Dana Desa. Kami juga ingin mengetahui proporsi kegiatan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan,” kata Helmi, sapaan akrab Helmizar, saat pertemuan dengan jajaran Pemkab Tegal, di Jawa Tengah, Jumat (22/2). Sebelumnya, PKAKN DPR RI juga menggelar pertemuan dengan jajaran Pemkab Brebes.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Dadang Darusman mengatakan, pihaknya mengapresiasi PKAKN BK DPR RI, sehingga dapat mengetahui pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Tegal. Pihaknya berharap, temuan ini menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan, sehingga lebih sinkron.

“Penggunaan Dana Desa selama

ini lebih banyak ke infrastruktur pemberdayaan. Ini ada masukan dari kepala desa, mungkin *enggak* Dana Desa itu sebagian digunakan untuk perbaikan Balai Desa. Karena banyak Balai Desa di daerah kami ini ini kondisinya kurang layak untuk menunjang penyelenggaraan desa,” jelas Dadang.

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Dadang mengakui saat ini sudah lebih baik. Saat ini dengan adanya rekrutmen perangkat desa, semua perangkat desa relatif sudah tercukupi dengan tingkat yang lebih baik. Seluruh perangkat desa yang kosong, sudah diisi dengan kualifikasi pendidikan yang sudah tercukupi.

“Cuma dari aspek peningkatan kapasitas itu masih harus dikembangkan, sehingga mereka mampu melaksanakan kegiatan tupoksi masing-masing terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Itu menjadi fokus yang perlu ditingkatkan terus menerus,” tandas Dadang. ■ **ran/sf**



PKAKN Badan Keahlian DPR RI dipimpin Kepala PKAKN Helmizar berfoto bersama usai melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkab Tegal

Foto: Ritika I ni

Pendidikan Tinggi Hadapi Berbagai Tantangan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengingatkan kepada civitas akademika di seluruh perguruan tinggi untuk bersiap menghadapi tantangan perubahan dalam pendidikan tinggi.

Menurutnya, dewasa ini perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan yang cukup berat, baik dari masyarakat selaku pengguna, maupun dari sisi tata kelola kampus.

Saat ini, tuntutan kualitas atau kompetensi dari masyarakat semakin meningkat, bahkan sudah menjadi suatu keharusan. “Kualitas saat ini menjadi suatu keharusan yang tidak hanya harus dipenuhi dari aspek lulusan, tetapi dari segi proses pembelajaran yang bisa ditawarkan,” kata Sutan dalam rilis yang

diterima *Parlementaria*, Senin (04/3).

Dalam hal proses pembelajaran ini, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menambahkan tentang arti penting akreditasi institusi perguruan tinggi. “Akreditasi institusi menjadi penting bagi masyarakat dalam menilai mutu perguruan tinggi,” tegas Sutan.

Sehingga dalam proses ini, ia mendorong seluruh perguruan tinggi meningkatkan akreditasi tiap program studinya. Dalam upaya mencapai ini, ia mengingatkan pentingnya peran penelitian serta pengabdian perguruan



Foto: Andri I mi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

tinggi. “Penelitian dan pengabdian menjadi penting karena menjadi tolak ukur kemajuan institusi perguruan tinggi,” tandas legislator dapil Jambi itu. ■ **sf**

Mitigasi Bencana Harus Meningkatkan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meningkatkan upaya untuk melakukan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Menurut Ace, upaya tersebut dapat dilakukan dengan mitigasi bencana. “Oleh karena itu, perlu ada semacam upaya deteksi dini dari BNPB terhadap beberapa bencana yang memang bisa dideteksi sejak awal, pengecualian dalam hal ini bencana seperti tsunami, yang memang agak sulit untuk bisa dideteksi,” ujar Ace, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNPB beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (05/3).

Legislator Partai Golkar tersebut menambahkan, upaya lainnya dengan memberikan pembelajaran dan pendidikan bagi masyarakat, dengan tujuan masyarakat khususnya anak-anak sekolah dapat mempersiapkan diri jika terjadi



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily

bencana sejak dari usia dini. Untuk itu, BNPB perlu meningkatkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“BPBD harus menjadi poin terdepan di daerah, karena mereka adalah lembaga yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Maka, BPBD harus bersikap proaktif dengan mempersiapkan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang memadai, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat untuk memberikan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana,” ungkap Ace.

Selain itu, Ace juga mendukung upaya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Revisi tersebut perlu segera dilakukan mengingat partisipasi masyarakat yang begitu penting dalam mitigasi bencana. “Saya mendukung revisi UU Penanggulangan Bencana, karena begitu pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana,” tutur Ace.

Legislator dapil Banten I ini juga menyampaikan, selain masyarakat, unsur-unsur lain perlu dilibatkan dalam proses pencegahan dan penanggulangan bencana, seperti unsur pemerintah daerah (pemda). Salah satu peran penting tersebut adalah mengenai anggaran mitigasi bencana di daerah.

“Jangan hanya tergantung kepada pemerintah pusat tapi juga pemda, di tingkat pemda harus memberikan posisi yang jelas kepada BPBD secara eselonisasi, termasuk juga keterlibatan lembaga penting lain seperti TNI, Polri dan Kementerian seperti Kementerian Sosial (Kemensos),” pungkas Ace. ■ **pun/sf**

Foto: Kresno I mi

DPR Pertanyakan Pengelolaan Limbah PT. Cemindo Gemilang

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Pimpinan Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Hidup Muhammad Nasir mempertanyakan permasalahan lingkungan terkait pencemaran air, polusi udara dan sedimentasi akibat operasionalisasi PT. Cemindo Gemilang dalam memproduksi semen merah putih.

Nasir menyesalkan pembuangan limbah cair perusahaan di Kabupaten Lebak tersebut langsung ke sungai.

Nasir memperingatkan PT. Cemindo Gemilang untuk segera melakukan perbaikan terhadap pengelolaan limbah

yang buruk oleh perusahaan tersebut. “Sudah 6 tahun lebih perusahaan ini berjalan, tapi belum memperlihatkan pengelolaan limbah dengan baik. Banyak masyarakat yang mengeluh terhadap pengoperasian perusahaan semen merah putih tersebut,” kata Nasir saat memimpin

sidak Komisi VII DPR RI ke PT. Cemindo Gemilang, di Bayah, Lebak, Provinsi Banten, Selasa (05/3).

Indikator lainnya yang juga Dewan ragukan adalah mengenai *proper* yang diterima perusahaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) cenderung menurun. “Sekarang kalau masalah lingkungan hidup, dianggapnya kejahatan yang paling serius. Kriterianya jangan jauh-jauh, dari *proper* yang dikeluarkan KLHK. *Proper* (yang diterima) makin ke sini makin jelek,” terang

“Sekarang kalau masalah lingkungan hidup, dianggapnya kejahatan yang paling serius. Kriterianya jangan jauh-jauh, dari *proper* yang dikeluarkan KLHK. *Proper* (yang diterima) makin ke sini makin jelek.”



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat memimpin sidak Komisi VII DPR RI ke PT. Cemindo Gemilang

legislator Partai Demokrat itu.

Menindaklanjuti hal itu, pihaknya berencana akan memanggil pimpinan PT. Cemindo Gemilang ke Senayan, Jakarta, dan meminta KLHK untuk meninjau lebih lanjut setiap potensi pelanggaran lingkungan yang terjadi. Lebih lanjut Nasir mengatakan, ketentuan mengenai lingkungan, akan diserahkan kepada KLHK.

Dirinya mengatakan, regulasinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. "Nanti KLHK bekerja dan melihat kondisi lapangan yang kita tinjau ini. Kesimpulannya baru kita sampaikan di rapat berikutnya. Pendalaman dan pengawasan lebih lanjut, kita berikan kesempatan kepada kementerian untuk menindaklanjuti hal itu," jelasnya.

■ man/sf



Foto: Andri | Imi

Lemahnya Aturan IPHPS Berpotensi Timbulkan Mispersepsi

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melihat lebih dekat lagi permasalahan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Kabupaten Boyolali.

Agar ke depannya tidak timbul permasalahan akibat lemahnya peraturan-peraturan yang berpotensi menimbulkan mispersepsi pada masyarakat, bahwa seolah lahan hutan itu menjadi hak miliknya.

"Maksud dan tujuan program ini bagus, tetapi kalau peraturannya tidak tertib dan tidak rapi, maka akan menimbulkan konflik sosial di masyarakat di masa yang akan datang," kata Willgo usai memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan jajaran BPK RI di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (06/3).

Dalam pertemuan itu, BAKN DPR RI menerima sejumlah masukan dari BPK RI, terkait hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan IPHPS di Boyolali. Dari hasil pemeriksaan BPK RI itu, menjadi pintu masuk bagi BAKN DPR RI untuk menelisik kembali aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan IPHPS, baik dari sisi peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan terkait lainnya.

"Kita banyak mendapat masukan dari BPK. Seperti beberapa permasalahan yang kita lihat ke depan nanti akan menjadi *dispute* (perselisihan, RED) antara Perhutani dengan rakyat. Karena bagaimanapun pengelolaan perhutanan itu sebetulnya diserahkan kepada Perhutani tetapi ada sebagian kemudian yang dikelola oleh rakyat," jelas politisi Partai Gerindra itu.



Foto: Artief | Imi

Wakil Ketua BAKN DPR RI Willgo Zainar

Willgo memastikan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang beberapa pihak terkait permasalahan IPHPS ini, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Perum Perhutani, dan juga Komisi yang terkait kehutanan dan lingkungan hidup, yakni Komisi IV DPR RI dan Komisi VII DPR RI. BAKN DPR RI perlu melakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundangan dan peraturan menteri yang berlaku.

"Dasar hukumnya tidak kuat, karena dalam jangka panjang selama 35 tahun itu masing-masing keluarga mendapatkan dua hektar, dan ini bisa diwariskan. Saya kira ini suatu perizinan atau kontrak yang panjang. Nantinya dikhawatirkan generasi yang di bawahnya, mungkin ahli waris dan sebagainya, akan timbul potensi permasalahan antara negara dengan rakyatnya," pesan legislator dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

■ afr/sf

BPKH Diminta Tingkatkan Koordinasi

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga teknis diminta agar meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lingkungan penyelenggara Haji lainnya.

Sejak dibentuk setahun lalu, koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Agama dan Badan Pengawas dalam urusan penyelenggaraan Haji masih belum optimal.

“Delapan puluh persen waktu BPKH dihabiskan untuk menyiapkan infrastruktur. Ada Badan Pengawas di luar BPKH. Saat ini, pembiayaan Haji harus melalui persetujuan Kemenag dan DPR. Berarti ada kebutuhan koordinasi yang cepat dan intens. Komunikasi dan koordinasi tidak bisa saling menunggu,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana



Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka

BPKH Anggito Abimayu, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (05/3).

Tahun awal bekerja merupakan proses transisi mengambil alih keuangan Haji dari Kemenag. Di sinilah BPKH butuh koordinasi intensif dengan Kemenag. Banyak pengambilan keputusan yang harus diambil cepat soal Haji dengan berkoordinasi terlebih dahulu bersama Kemenag, Badan Pengawas, dan bahkan DPR RI. “Sekarang 2019 perlu ada peningkatan komunikasi dan koordinasi karena banyak kamar dalam pengambilan keputusan cepat dan teknis,” tutur Diah.

Ditambahkan politisi PDI Perjuangan itu, beban kerja BPKH tidak hanya pada persoalan teknis keuangan, tapi juga BPKH punya beban strategis untuk mengatur investasi. Di sini, kata Diah, butuh sistem manajemen yang baik untuk mengelola semuanya. “Kita berharap lembaga ini bebannya tidak hanya lembaga teknis juga ada beban strategis untuk investasi ke depan. Jangan sepelekan manajemen sistem, koordinasi, dan komunikasi untuk menyelesaikan semuanya,” tutup Diah. ■ mh/sf

Renstra Untuk Hasilkan Kegiatan Berkualitas dan Akuntabel



Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha

“Sehingga kegiatan ini tidak hanya membagi-bagi anggaran di masing-masing unit kerja, tetapi penekanannya lebih kepada apa *output* dan *outcome* yang harusnya

Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha menjelaskan, rapat kerja penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2020 dan persiapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2020-2024 bertujuan menghasilkan perencanaan kegiatan dan anggaran yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, mematuhi ketentuan peraturan perundangan, dan pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dalam mengelola keuangan negara.

dihasilkan dari kegiatan itu. Nah biasanya dalam setiap raker itu nanti ada gagasan atau pemikiran-pemikiran baru,” jelasnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (02/3). Rapat kerja ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan dihadiri seluruh pejabat Eselon I dan II di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Sebagai salah satu panelis dalam kegiatan ini, Totok, sapaan akrab Setyanta menekankan, setiap unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI perlu memiliki inovasi. Ia menilai sebuah pengembangan minimal akan menghasilkan cara-cara kerja baru yang lebih berkualitas yang pada ujungnya akan menghasilkan satu layanan yang efektif, efisien dan cepat,

mudah, murah, kemudian *up to date*.

Sejalan dengan pencanangan parlemen modern yang ditandai dengan pengembangan teknologi informasi, lanjut Totok, itu menjadi fokus Setjen dan BK DPR RI untuk memberikan fasilitas kegiatan Dewan terhadap parlemen modern itu. Mulai dari aspek teknologi informasi hingga aspek tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara. Aplikasi DPR Now adalah salah satu inovasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi hasil kerja Anggota DPR RI serta sarana penghubung wakil rakyat dan masyarakat.

“Nah inilah yang kita harapkan dalam Renstra ke depan, menjadi bagian program yang harus difasilitasi oleh Setjen dan

Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Komitmen Bersama Capai Tujuan Organisasi

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menandatangani perjanjian kinerja Tahun 2019 bersama Inspektur Utama Setyanta Nugraha, Deputi Bidang Persidangan Damayanti, dan seluruh jajaran pejabat Eselon I dan II di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Indra mengatakan, hal ini merupakan komitmen untuk menuntaskan tanggung jawab masing-masing unit kerja dan acuan pelaksanaan dan penilaian kinerja, dan pendukung peningkatan nilai dan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

BK. Sehingga DPR betul-betul menjadi lembaga yang dipercaya oleh rakyat, citra DPR meningkat, dan pada akhirnya akan mendapat kepercayaan dari rakyat,” harap Totok.

Hal senada diungkapkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen dan BK DPR RI Satyanto Priambodo. Ia mengatakan, Renstra 2020-2024 akan difokuskan pada parlemen yang modern. Perubahan dari organisasi yang bersifat otoritas menjadi organisasi terbuka. “Ke depan kita juga akan membangun semacam *big data*. Belum lama juga Ketua DPR meresmikan *BBC parlemen broadcasting*,” sambungnya.

Terakhir, masih kata Nanang, sapaan akrab Satyanto, terkait penyusunan RKA-K/L tahun 2020, Nanang mengatakan Eselon II di setiap unit kerja perlu secara cermat dan bijak menentukan skala prioritas dalam program kerja satu tahun dan memiliki capaian *outcome* untuk Dewan.

“Istilahnya satu rupiah pun yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal DPR itu harus bermanfaat dengan kegiatan Dewan. Karena keberadaan Sekretariat Jenderal itu adalah sebagai *supporting system* Dewan. Bukan karena Dewan tidak ada, kami ada. Justru kami ada karena Dewan,” pungkas Nanang. ■ **apr/sf**



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menandatangani perjanjian kinerja Tahun 2019

“Ini bukan sekedar formalitas selembar kertas yang ditandatangani, tapi mengingatkan kita semua, bahwa ini komitmen kita untuk menuntaskan tanggung jawab. Kita semua sibuk bekerja, anggaran kita serap, tapi fakta di luar orang tidak secara signifikan melihat kemajuan Sekjen dan BK secara lebih baik,” jelas Indra usai rapat kerja anggaran dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Setjen dan BK DPR RI tahun 2020-2024, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (03/3).

Indra menyebutkan, setidaknya ada lima tujuan dari penandatanganan perjanjian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja laporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Pertama, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja.

Kedua, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi. Ketiga, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Keempat, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, dasar pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja

penerima amanah. Terakhir, sebagai dasar dalam menetapkan sasaran kinerja pegawai.

“Ke depan perjanjian kinerja dilakukan hingga level staf, sehingga akan menjadi komitmen bersama dalam pencapaian tujuan organisasi guna memberikan dukungan yang prima bagi kelancaran tugas DPR,” imbuh Indra.

Penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan oleh seluruh pejabat Eselon I dan II di seluruh unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Unit-unit tersebut meliputi biro di lingkungan Deputi Persidangan, diantaranya Biro Persidangan I dan II, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Kerja Sama Antar Parlemen, dan Biro Pemberitaan Parlemen.

Kemudian Inspektur I dan II. Selanjutnya Kepala Pusat di lingkungan Badan Keahlian DPR RI yang meliputi Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Pusat Kajian Anggaran, dan Pusat Penelitian.

Dilanjutkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi. Terakhir, Biro di lingkungan Deputi Bidang Administrasi yang meliputi Biro Protokol, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, Biro Kepegawaian Organisasi, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, dan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara.

■ **apr/sf**

DPR Meriahkan Pameran Kampung Hukum

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI turut memeriahkan Pameran Kampung Hukum 2019 bertema “Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi” yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI. Pameran digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Hall Senayan, Jakarta, Rabu (27/2).

Pameran yang dimeriahkan 34 booth dari berbagai Kementerian maupun Lembaga Negara di bidang penegakkan hukum ini merupakan acara rutin tahunan MA RI dalam rangka penyampaian Laporan Tahunan (Laptah) MA 2018 oleh Ketua MA M. Hatta Ali.

Laporan Tahunan MA kali ini dihadiri Presiden Joko Widodo, seluruh pimpinan lembaga negara/kementerian, pimpinan MA, para duta besar negara sahabat, seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh Pimpinan Pengadilan Pertama Kelas IA.

Kepala Sub Bagian Penerangan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setjen dan

BK DPR RI Erna Agustina mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi lembaga negara serta lembaga penegak hukum. Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai peran dan fungsi lembaga yang mengikuti pameran.

“Walaupun DPR RI lembaga legislatif, tetapi DPR juga mempunyai produk-produk yang disebarluaskan secara elektronik dimana sejalan dengan era keterbukaan dan penerapan informasi teknologi,” ujar Erna di sela-sela memberikan penjelasan kepada pengunjung pameran.

Dirinya berharap, penyelenggaraan pameran seperti ini dapat memberikan

edukasi kepada masyarakat tentang produk-produk DPR RI di bidang legislasi, serta mengenalkan aplikasi yang mendekatkan masyarakat kepada DPR RI dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPR RI.

Disebutkan Erna, beberapa aplikasi yang dapat diakses langsung masyarakat di *website* resmi www.dpr.go.id, diantaranya, Simas PUU, Simas Panlak UU, PPID, SDIP, rumah aspirasi, pengaduan masyarakat dan siaran TV Parlemen.

Pameran Kampung Hukum juga menggelar *talkshow* dengan topik mengenai E-court bertajuk “Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi” dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang seperti Badan Peradilan Umum, Pengamat Hukum, Advokat dan Hakim Yustisial.

Selain DPR RI, pameran turut dimeriahkan booth Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ditjen Peradilan Agama MA, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengawasan MA, OJK, BPK, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan RI, KPK RI, BNN, Ditjen Peradilan Umum MA, Ditjen Peradilan Militer, Kepolisian RI, Komisi Yudisial, Balitbangdiklat MA, BTN dan BNI Syariah. ■ **aan/sf**



Kepala Sub Bagian Penerangan Bagian Humas Setjen dan BK DPR RI Erna Agustina saat menjelaskan informasi peran dan fungsi DPR RI

Foto: Tara Irti

Kampus Diharapkan Beri Masukan Penyusunan RUU SPIP

Badan Keahlian DPR RI bekerjasama dengan Asosiasi Administrasi Negara (ASIAN) menyelenggarakan Simposium Desa yang bertajuk “Menggagas Pemerintah Desa Sebagai Penyelenggara Langsung Pelayanan Publik” di Universitas Tidar Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (01/3).

Simposium ini sekaligus bentuk implementasi dari kerja sama yang telah dibangun antara BK DPR RI dengan Universitas Tidar Magelang.

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul yang bertindak sebagai narasumber dalam simposium tersebut mengungkapkan simposium ini sekaligus serap masukan terhadap RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), yang telah masuk daftar Prolegnas tahun 2015-2019. Dan saat ini BKD masih dalam proses penyusunan Naskah Akademik (NA). Dalam proses penyusunan NA ini, masyarakat bisa berperan aktif dalam menyampaikan gagasan dan aspirasinya.

Menurut Sensi, sapaan akrab Inosentius, BK DPR RI berkomitmen menyusun NA dengan menggunakan prinsip yang partisipatif, transparan,

BK DPR RI berkomitmen menyusun NA dengan menggunakan prinsip yang partisipatif, transparan, akuntabel, profesional, berintegritas, efisien dan efektif. “Hal itu dilakukan melalui beberapa instrumen diantaranya adalah penyusunan database yang meliputi data kepakaran, ketokohan, lembaga kemasyarakatan umum atau yang terdaftar serta mitra strategis yang telah melakukan MoU dengan Badan Keahlian DPR RI,”



Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul

akuntabel, profesional, berintegritas, efisien dan efektif. “Hal itu dilakukan melalui beberapa instrumen diantaranya adalah penyusunan *database* yang meliputi data kepakaran, ketokohan, lembaga kemasyarakatan umum atau yang terdaftar serta mitra strategis yang telah melakukan MoU dengan Badan Keahlian DPR RI,” terang Sensi.

Terkait dengan tema simposium tersebut, Sensi mengungkapkan sejumlah paparan yang salah satunya terkait asas manajemen seperti *controlling* yang perlu ditekankan dalam sebuah regulasi sebagaimana ilmu administrasi. Ilmu administrasi menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan disusun perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penganggaran (*budgeting*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).

Sementara *controlling* adalah upaya untuk memastikan bahwa semua kegiatan manajemen diselenggarakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. “*Controlling* berupa kegiatan supervisi, monitoring, pengendalian mutu, pengawasan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif,” ungkap Sensi.

Karena itulah, ilmu administrasi bisa

... administrasi bisa menjadi acuan dalam menyusun sebuah regulasi yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terlebih dalam penyusunan RUU perlu mendapatkan masukan dari banyak pihak agar filterisasi intelektual membuat RUU yang dihasilkan menjadi berkualitas.

menjadi acuan dalam menyusun sebuah regulasi yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terlebih dalam penyusunan RUU perlu mendapatkan masukan dari banyak pihak agar filterisasi intelektual membuat RUU yang dihasilkan menjadi berkualitas.

“Dalam rangka itulah, BK selalu mengadakan kegiatan di kampus seperti simposium ini, karena kita memang sudah menandatangani MoU. Di sini kita mempersentasikan RUU SPIP. Karena (SDM) di DPR itu sangat terbatas, kita tidak punya ahli dalam berbagai RUU. Kita butuh dukungan dari akademisi yang secara langsung membantu kita merumuskan naskah akademik,” tutup Sensi. ■ **soe/sf**

Sertifikat Diklat Tingkatkan Kualitas Pusdiklat DPR

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Agung Budi Santoso menyampaikan apresiasinya kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen dan BK DPR RI yang telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga sah menjadi pelaksana sertifikasi bidang perencanaan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dinilai Agung merupakan langkah kemajuan. “Sehingga, pegawai Setjen dan BK DPR yang ingin meningkatkan kompetensinya, bisa ikut serta dalam diklat internal. Hal tersebut lebih baik, karena sebagai lembaga legislatif yang utamanya membuat undang-undang, maka harus mempunyai personel yang menguasai peraturan perundang-undangan yang berkualitas,” ujar Agung, usai menghadiri Penyerahan Sertifikat Penyelenggaraan Diklat dari

Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham kepada Setjen dan BK DPR RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (01/3).

Politisi Partai Demokrat itu menyampaikan, dirinya sangat mendukung Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI untuk semakin maju dan terus meningkat. Sebetulnya, kalau dihitung dari jumlah pegawai, Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI sudah masuk kategori untuk bisa menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Namun, hal tersebut

belum dapat terlaksana, karena belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai.

“Tentunya kita harus memenuhi sarana dan prasarana Pusdiklat. Saya berpesan kepada Pusdiklat DPR untuk meningkatkan serta tidak henti mengadakan pelatihan sertifikasinya, agar bisa terus meningkat sampai ke tahap nilai A yang merupakan nilai sempurna,” pesan Agung sembari menambahkan, dirinya mendukung total setiap hal baik dalam rangka peningkatan kualitas Setjen dan BK DPR RI sebagai *supporting system* daripada DPR RI.

Sementara itu, Kepala Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI Rahaju Setya Wardhani menyampaikan rasa terima kasih kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan BURT DPR RI yang telah mendukung kemajuan Pusdiklat. “Sarana dan prasarana yang awalnya belum mempunyai apa-apa, berkat dukungan fraksi-fraksi yang ada di DPR, Pimpinan DPR, khususnya Pimpinan BURT Agung Budi Santoso, sangat mendukung kami untuk diberikan fasilitas. Sehingga Pusdiklat Setjen dan BK DPR dapat semakin besar,” pungkas Yayuk, sapaan akrabnya. ■ pun/sf



Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso menyaksikan Penyerahan Sertifikat Penyelenggaraan Diklat dari Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham kepada Setjen dan BK DPR RI

Foto: Arief Irfani

Pelaksanaan Program Jamkestama RS Horas Insani Berjalan Baik



Foto: Tiara Irti

Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing saat meninjau RS Horas Insani

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing menilai pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya di Rumah Sakit (RS) Horas Insani, Pematang Siantar, Sumatera Utara, sudah berjalan dengan baik.

Kendati demikian menurutnya pelayanan dan fasilitas RS juga harus ditingkatkan. “Sebagai salah satu RS yang menjadi *provider* PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) pelayanan serta fasilitas yang ada di RS Horas Insani ini sudah cukup memadai. Namun beberapa hal juga perlu ditingkatkan menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada,” jelas Anthon usai memimpin pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan direksi dan

jajaran RS Horas Insani, Pematang Siantar, Sumut, Rabu (06/3).

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, dalam program Jamkestama kerap kali terjadi Anggota DPR RI mendapat pelayanan yang kurang memadai. Hal ini disinyalir disebabkan karena program Jamkestama belum tersosialisasikan dengan baik kepada RS *provider* yang belum memiliki sarana yang memadai untuk melaksanakan pelayanan berstandar VVIP.

“Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka BURT perlu melakukan peninjauan secara langsung terhadap pelaksanaan program dimaksud,” tutur Anggota Komisi V DPR RI itu.

Di sisi lain pada pertemuan tersebut, BURT DPR RI mendapatkan keluhan terkait tunggakan klaim BPJS Kesehatan terhadap RS Horas Insani. Menanggapi hal itu, Anthon menyanggah hal tersebut, dan menilai urusan kesehatan merupakan hal utama dan tugas mutlak pemerintah,

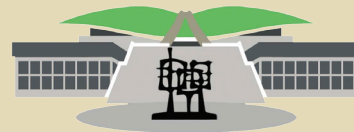
dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Untuk itu dirinya berharap pemerintah dapat segera melunasi kewajibannya kepada RS terkait.

“Menurut saya tidak ada alasan dari pemerintah untuk tidak memperhatikan atau melunaskan apa yang menjadi utang BPJS Kesehatan. Manajemen BPJS harus lebih baik ke depannya. Hal ini akan kami teruskan dan kami perjuangkan khususnya bagi RS yang tunggakan klaimnya terlalu lama belum dibayarkan,” tandas politisi dapil Sumut III itu.

Terakhir, Anthon berharap melalui Kunker ini, program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarga dapat lebih tersosialisasikan dengan baik. “Selain itu juga Jasindo melalui RS *provider*-nya diharapkan juga dapat memastikan bahwa program Jamkestama dilaksanakan secara optimal dan sesuai peraturan,” imbuh Anthon.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Direktur PT Horas Insani Petrus Yusuf mengeluhkan lamanya klaim BPJS Kesehatan terhadap RS Horas Insani.

■ tra/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima penghargaan Best Parliamentarians saat acara Tough Leader "Obsession Awards 2019, di Jakarta, Rabu (06/3). Foto: Jaka/hr



Komisi I DPR RI saat menerima Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmina Vorobieva di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (04/3). Foto: Kresno/hr



Komisi VIII DPR RI saat Rapat Kerja dengan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (05/3). Foto: Kresno/hr

